



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERRY ANDRIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **414272**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.721.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/255 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.520.000.000
2. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah Seluas 10125 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 18931 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. Tanah Seluas 9440 m2 di KAB / KOTA BINTAN, WARISAN Rp. 1.516.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 418 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 3.160.000.000
7. Tanah Seluas 267 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
8. Tanah Seluas 111 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
9. Tanah Seluas 290 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 332.500.000**



1. MOTOR, YAMAHA 157 JUPITER - MX 135 CC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, HONDA/BRV BR-V DG3 1.5L PRE CVT/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 329.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 31.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.112.500.000

III. HUTANG Rp. 328.126.670

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.784.373.330

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.